



## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum wr wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat Nya kita mendapat kekuatan dan keteguhan Iman dalam pengabdian kita pada Bangsa dan Negara. Dan seiring dengan itu semua, kami sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan dan menyusun kegiatan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2016 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini selama lima (5) ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman landasan kerja untuk kegiatan lima (5) Tahun kedepan Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang. Dan kami berharap dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pegawai di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang dan serta mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan dokumen ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita sekalian, didalam melanjutkan perjuangan dan pengabdian terbaik kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekian terima kasih.

Wasalamualaikum wr wb.

Pemalang, 19 September 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT**

PERATURAN KANTOR KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 910/ 565  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2016

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011-2016

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra);
  - b. Bahwa dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-2016, maka Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, Misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pemalang;
  - c. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalangtentang Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422));
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2011 – 2016.**

**Pasal 1**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang 2011-2016.

**Pasal 2**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 2.2. Sumber daya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.4. Penentuan Isu – isu strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
- 4.1. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- 4.3. Strategis dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- 5.1. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
- 6.1. Tabel Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- BAB VII PENUTUP.**

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Strategis (RESTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Pemalang, 19 Setember 2011

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

**AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.**  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> 12
1.1.	Latar Belakang..... 12
1.2.	Landasan Hukum ..... 12
1.3.	Maksud dan Tujuan..... 13
1.4.	Sistematika Penulisan..... 13
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> 15
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 15
2.2.	Sumber daya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 17
2.3.	Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 18
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 18
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> 19
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 19
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 19
3.3.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 19
3.4.	Penentuan Isu – isu strategis ..... 19
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> 21
4.1.	Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 21
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 21
4.3.	Strategis dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 22
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b> 28
5.1.	Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 28
5.2.	Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 28
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> 29
6.1.	Tabel Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ..... 29
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.</b> 31

## DAFTAR TABEL

Lampiran- lampiran :	Halaman
Tabel 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang	22
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang	24
Tabel 3.4 Permasalahan Isu-isu strategis yg di hadapi dan penanganan pada tahun berjalan	25
Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang	26



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana telah menjadi agenda nasional sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus tetap dipandang sebagai satu kesatuan dengan upaya penguatan persatuan dan kesatuan nasional, sehingga program implementasi kebijakan desentralisasi yang telah, sedang dan akan terus dikembangkan tetap dilakukan dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah harus tetap kondusif bagi hidup dan berkembangnya kemajemukan yang merupakan karakteristik masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemajemukan ini perlu terus dipelihara, dikembangkan dan dibina secara berkesinambungan dan terprogram, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh dimensi kemandirian dan otonomi masyarakat, sehingga intervensi dari pihak manapun sedapat mungkin dapat dihindari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka upaya pemantapan persatuan dan kesatuan sebagaimana telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), perlu terus menerus untuk ditingkatkan.

Untuk itu perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Pematang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan.

### **I.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, tanggal 19 Januari 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004 – 2009 ;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah ;
9. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pematang Jaya.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renstra Kantor Kesbang, Pol dan Linmas 2011 – 2016 disusun sebagai pedoman/ landasan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra SKPD 2011 – 2016 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten yang sudah ada. Substansi Renstra SKPD ini menyelaraskan dengan agenda dan prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 - 2016.

Sebagai dokumen perencanaan kegiatan, Renstra SKPD Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 – 2016 harus menjadi pedoman dan acuan dan untuk operasionalisasi lebih lanjut, Renstra SKPD ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Pematang Jaya.

Adapun sistematika penulisan Renstra Kantor Kesbang, Pol dan Limas Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.....
- 1.2. Landasan Hukum .....
- 1.3. Maksud dan Tujuan.....
- 1.4. Sistematika Penulisan.....

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 2.2. Sumber daya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....
- 3.4. Penentuan Isu – isu Strategis .....

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- 4.1. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 4.3. Strategis dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1. Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....
- 5.2. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat .....

**BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**BAB VII PENUTUP.**

Lampiran- lampiran :

Tabel 2.1 Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang

Tabel 3.4 Permasalahan Isu-isu strategis yg di hadapi dan penanganan pada tahun berjalan

Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang

Tabel 6.1 Indikator kinerja Kantor Kesbangpolinmas Kab Pemalang yg mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kantor di Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 21008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang

##### **1. Tugas Pokok :**

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

##### **2. Fungsi :**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

##### **3. Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai kewenangan wajib, yaitu urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

## 4. Uraian Tugas

### 4.1 Kepala

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

### 4.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan perencanaan, ketatausahaan kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

### 4.3 Kepala Seksi Kesatuan Ketahanan Bangsa

Kepala Seksi Kesatuan Ketahanan Bangsa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, menyusun program dan kegiatan serta pembinaan di bidang Kesatuan Ketahanan Bangsa.

### 4.4 Kepala Seksi Politik Dalam Negeri

Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, menyusun program dan kegiatan serta pembinaan di bidang Politik Dalam Negeri.

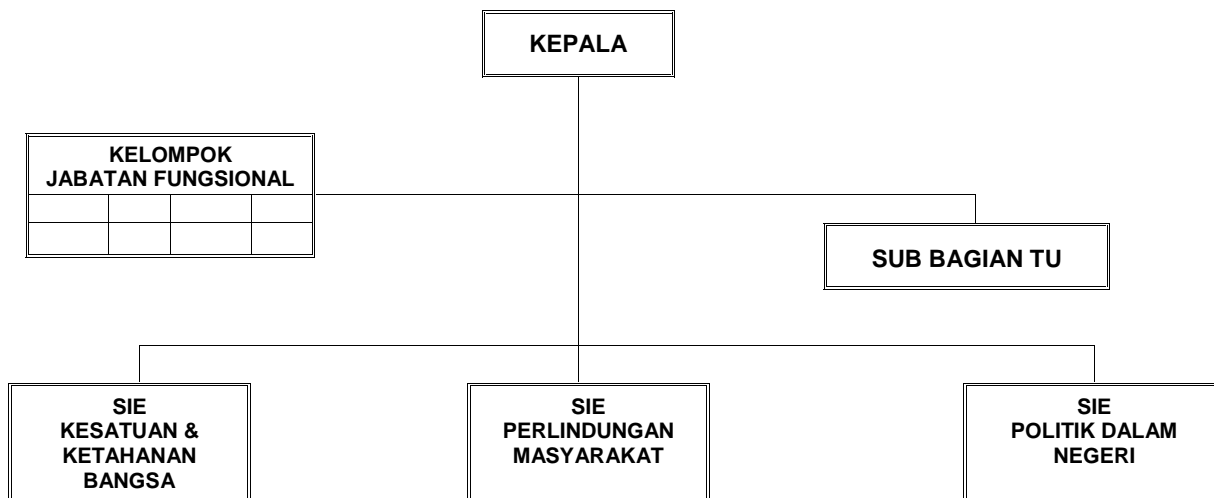
### 4.5 Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis, menyusun program dan kegiatan serta pembinaan di bidang Perlindungan Masyarakat.

## 5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Jaya, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Kesatuan & Ketahanan Bangsa ;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
- e. Seksi Politik Dalam Negeri ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



## 2.2 SUMBER DAYA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kondisi Personil pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

PNS berdasarkan pangkat :

Gol. Ruang	IV/a	: 1.
	III/d	: 4.
	III/c	: 1.
	III/b	: 4.
	III/a	: 2.
	II/d	: 1.
	II/c	: 2.
	II/b	: 1.
	II/a	: 3.
	I/c	: 1.

PNS berdasarkan pendidikan :

Sarjana Strata 2 (S-2)	: 2.
Sarjana Strata 1 (S-1)	: 5.
Sarjana Muda	: 1.

SLTA	: 9.
SLTP	: 2.
SD	: 1.

Sedangkan sarana prasarana pada Kantor Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

PRASARANA FISIK :

Roda empat	: 2 buah
Roda dua	: 5 buah
Komputer lengkap	: 6 unit
AC	: 4 buah
Mesin Faxcimile	: 1 buah

Kipas Angin	:	3 buah
Mesin ketik	:	5 buah
Pesawat Telephone	:	1 buah
Pesawat Aiphone	:	1 buah
Filling cabinet	:	15 buah
Pesawat HT	:	12 buah
Perahu karet	:	1 set
Power suply & antene	:	1 set
Tenda Peleton	:	2 set

### **2.3 KINERJA PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Tabel 2.1 dan 2.2 terlampir.

### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang lima tahun kedepan semakin kompleks, seiring dengan perkembangan politik di tanah air yang multi partai ditambah dengan adanya demokrasi yang semakin bebas sehingga perlu adanya pemikiran – pemikiran dalam rangka untuk melakukan pendekatan pada pihak – pihak yang dianggap rawan menimbulkan gejolak/konflik.

Konflik – konflik sering terjadi pada daerah – daerah tertentu utamanya didaerah pedesaan yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang penuh dengan kepentingan – kepentingan politik, agama maupun kepentingan golongan atau pribadi. Untuk itu lah diperlukan adanya pembentukan lembaga – lembaga/ forum – forum yang menghimpun kepentingan seluruh masyarakat, contoh : Pembentukan FKUB, FKDM, Forum Ormas dan LSM, Kominda dan lain – lain.

Pembentukan lembaga/forum ini diharapkan dapat mengurangi gesekan/konflik yang sering terjadi dimasyarakat, karena lembaga/forum ini dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Untuk menghadapi tantangan ini semua diperlukan adanya perencanaan maupun program kerja yang jelas dan terarah, tentunya diperlukan adanya dukungan dana yang memadai.

Adapun peluang pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang dengan melihat tantangan tersebut diatas maka jelas perlu adanya peningkatan status kelembagaannya dari Kantor menjadi Dinas/Badan, mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

Sejalan dengan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang, maka permasalahan yang ada dapat diinventarisir antara lain :

1. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ;
2. Bagaimana meningkatkan koordinasi antar Dinas/Instansi dan kekuatan sosial politik dalam masyarakat ;
3. Bagaimana meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap hakekat bencana yang mungkin timbul ;
4. Bagaimana meningkatkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan serta kesadaran bela negara ;
5. Bagaimana meningkatkan keamanan dan ketertiban umum ;
6. Bagaimana meningkatkan pembangunan di bidang kepemudaan.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kantor Kesatuan Bangsa, Pol dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai peranan yang sangat penting dalam ikut serta mewujudkan iklim kondusif di Kabupaten Pemalang khususnya, dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Situasi dan kondisi secara umum telah teridentifikasi dan masih terdapat beberapa situasi / kondisi yang perlu banyak perhatian, khususnya yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

Sesuai dengan momentum strategis Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang maka kondisi yang diharapkan untuk tahun berikutnya adalah terciptanya suasana Pemerintahan yang aman, tertib dan terkendali di Kabupaten Pemalang. Serta terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Adapun proyeksi kedepan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan Sumber Daya Manusia, maka peran Kantor Kesatuan Bangsa & Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang, dituntut untuk senantiasa aktif, peka, peduli pada lingkungan dan masyarakat yang semakin dinamis dan kritis. Untuk itu dalam menyusun program kerja maupun kegiatan 5 tahun kedepan harus memperhatikan hal-hal tersebut diatas.

#### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tabel 3.3 terlampir



### **3.4 Penentuan Isu – isu Strategis**

Adapun isu – isu strategis yang terjadi di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Jaya meliputi :

1. Masih kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam masyarakat disebabkan oleh menurunnya jiwa nasionalisme ;
2. Belum teraktualisasinya nilai – nilai budaya lokal dalam rangka pembentukan karakter/budaya masyarakat ;
3. Masih terdapat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu mendapat antisipasi /penanganan ;
4. Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta penanganan penyakit masyarakat (Pekat) ;
5. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (Linmas) dan rakyat terlatih (Ratih) dalam melaksanakan penanganan awal gangguan kamtibmas ;
6. Belum optimalnya manajemen/pengelolaan bencana alam ;
7. Masih rendahnya pendidikan politik khususnya bagi pemilih perempuan, pemilih pemula dan masyarakat desa, terkait dengan kesadaran politik, pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara serta penegakan hukum dan HAM di daerah ;
8. Kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang Peraturan Daerah yang berlaku masih kurang ;

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial kemungkinan bisa terwujud. Adapun visi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang adalah **“TERWUJUDNYA SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS, DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu tujuan.

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan komunitas kehidupan politik masyarakat yang sehat dan cerdas ;
2. Peningkatan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui kehidupan politik yang berkesinambungan ;
3. Pemeliharaan kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya disintegrasi bangsa ;
4. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis ;
5. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan ke arah kehidupan politik yang bernuansa HAM, berkeadilan, bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam rangka penentuan langkah-langkah yang lebih operasional, maka di rumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib Administrasi Perkantoran sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Mengurangi kesalahan penataan Adm.
  - b. Meningkatkan pelayanan Adm perkantoran
2. Terpenuhinya sarana prsarana aparatur sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan pelayanan aparatur
3. Terciptanya sikon yg kondusif sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Menurunnya gangguan kamtibmas
  - b. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat.

4. Terwujudnya kemandirian & kemampuan komponen linmas sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan kemampuan tng linmas di masy dlm menangani gangguan kamtibmas
5. Terwujudnya tatanan kehidupan bgs & sis pol yg demokratis, dinamis berdasarkan kedaulatan rakyat yg menghormati kebinekaan sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan pengetahuan sumber daya masy ttg sispol yg demokratis & wasbang
  - b. Meningkatkan rasa/ jiwa nasionalisme kpd masy dlm rangka mempertahankan NKRI
6. Terwujudnya stabilitas politik yg dinamis & kondusif bg kelancaran pemerintahan & pembangunan sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Menurunnya gangguan kamtibmas
  - b. Meningkatnya sistem demokratis yg aman terkendali
7. Terwujudnya sikon yg aman terkendali sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Menurunnya peredaran & penggunaan miras & narkoba di masy
  - b. Meningkatkan pengetahuan kpd masy ttg bhy miras & narkoba
8. Terwujudnya pengetahuan & pemahaman masy ttg sispol sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan pengetahuan masy ttg politik
9. Pelayanan informasi Bencal sebagai implementasi kebijakan daerah dengan sasaran :
  - a. Meningkatkan pelayanan kpd masy dlm penanggulangan bencal
  - b. Mengurangi resiko/ dampak terjadinya bencal

#### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **a. STRATEGI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Faktor-faktor Kunci keberhasilan adalah ukuran yang mengandung kebenaran dan kebaikan terhadap keyakinan dan perilaku organisasi yang dianut dan digunakan sebagai budaya kerja dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan kegiatan visi dan misi organisasi.

Sebelum membuat analisa faktor stratejik maka terlebih dahulu dilihat kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang berupa kekuatan Internal (Strenght), Kelemahan Internal (Weaknesses), Peluang Eksternal (Opportunisties), Tantangan Eksternal (Threats).

Salah satu proses dalam menyusun Rencana Strategik adalah penilaian Lingkungan Organisasi melalui proses analisis lingkungan. Yang dimaksud di sini kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh di dalam dan di sekeliling organisasi yang berdampak pada kehidupan organisasi berupa kekuatan Internal (Strength), Kelemahan Internal (Weaknesses), Peluang Eksternal (Opportunities), Tantangan Eksternal (Threats). Untuk analisis lingkungan diperlukan penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam Lingkungan Internal (ALI) dan Lingkungan Eksternal (ALE).

ALI adalah studi tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasi masa kini dan berpotensi akan muncul di masa mendatang, misalnya : Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana, Biaya dan lain-lain. ALE adalah studi tentang tantangan dan peluang organisasi masa kini dan berpotensi akan muncul di masa datang yang meliputi berbagai faktor antara lain : Ekonomi, Politik, Sosial Budaya, Ketentaman dan Ketertiban, Teknologi, Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

#### IDENTIFIKASI LINGKUNGAN INTERNAL (LI) DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL (LE)

NO	INDIKATOR LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL ( LI dan LE )	FAKTOR – FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIK (LS)
1	2	3
1.	Internal	Internal
	a. Organisasi	a. SOT telah disusun dengan Perda No. 7 Tahun 2000 (+) b. Semua jabatan struktural telah terisi (+) c. Jabatan fungsional belum terisi (-) d. Koordinasi belum optimal (-)
	b. Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Pendidikan struktural telah terpenuhi (+) b. Diklat Teknis / Fungsional kurang (-) c. Tingkat Pendidikan formal memenuhi (+) d. Kinerja pegawai rendah (-)
	c. Sarana	a. ATK kurang memadai (-) b. Gedung / Kantor kurang memadai (-) c. Sarana mobilitas kurang memadai (-)
	d. Biaya	➤ Biaya operasional kurang (-)

1	2	3
2.	Eksternal	Eksternal
	a. Ekonomi	a. potensi perekonomian daerah tinggi (+) b. Pendapatan masih rendah / belum mencukupi untuk biaya rutin (-) c. potensi kekayaan sumber daya alam sebagai pendorong perekonomian cukup. (+)
	b. Politik	a. kondisi politik secara umum kondusif (+) b. berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai aset pembangunan (+) c. meningkatnya fungsi legislatif dalam pengawasan terhadap eksekutif (+) d. kepedulian organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat (+) e. munculnya banyak partai (-) f. kurangnya pendidikan politik (-) g. kurang mandirinya infrastruktur politik dalam melaksanakan kaderisasi sebagai pilar demokrasi. (-)
	c. Sosial budaya	a. Masyarakat religius (+) b. adanya pembangunan budaya daerah (+) c. meningkatnya peran masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan. (+) d. kurang dipahaminya wawasan kebangsaan (-) e. naiknya angka pengangguran (-) f. meningkatnya unjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah (-) g. antisipasi dini dari aparat dalam menghadapi berbagai gejolak sosial. (-) h. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan relatif tinggi (+) i. SDM masyarakat rendah (-)
	d. Trantib	a. Koordinasi penanganan terhadap terjadinya konflik sosial yang ada di beberapa desa baik (+) b. Meningkatnya satuan Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi (+) c. kondisi keamanan secara umum kondusif. (+)
	e. Teknologi	➤ Aplikasi teknologi tepat guna mahal (-)
	f. Lingkungan hidup	➤ Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingk. tinggi (+)
	g. Geografi	➤ Letak geografi strategis (+)
	h. Stakeholder	a. Partisipasi masyarakat positif (+) b. Kontrol masyarakat tinggi (+)

## ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) DAN ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)

NO	Faktor-faktor LS Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman	Bobot	Rating Dampak thd Organisai	Skor	ASI
1	2	3	4	5	6
1.	Internal				
	a. Kekuatan :				
1	2	3	4	5	6
	1. SOT telah disusun sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2008	35	4	140	I
	2. Semua jabatan struktural telah terisi	30	4	120	II
	3. Pendidikan struktural telah terpenuhi	20	3	60	III
	4. Tingkat pendidikan formal terpenuhi	15	2	30	IV
		<b>100</b>			
	b. Kelemahan :				
	1. Jabatan fungsional belum terisi	15	4	60	I
	2. Koordinasi belum optimal	12	3	36	V
	3. Diklat teknis / fungsional kurang	10	2	20	VIII
	4. Kinerja pegawai rendah	14	3	42	III
	5. ATK kurang memadai	13	3	39	IV
	6. Gedung / kantor kurang memadai	11	2	22	VII
	7. Sarana mobilitas kurang memadai	12	2	24	VI
	8. Biaya operasional kurang	13	4	52	II
		<b>100</b>			
2.	Internal				
	a. Peluang :				
	1. potensi perekonomian daerah tinggi	13	4	52	I
	2. Masyarakat religius	12	3	36	III
	3. Partisipasi masyarakat dlm pembangunan relatif tinggi	10	2	20	VII
	4. Kondisi politik secara umum kondusif	9	2	18	VIII
	5. Kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup tinggi	8	2	16	IX
	6. Kondisi keamanan scr umum kondusif	9	3	27	V
	7. Letak geografis strategis	7	2	14	X
	8. Partisipasi masyarakat positif	8	3	24	VI
	9. Kontrol masyarakat tinggi	11	3	33	IV
		<b>100</b>			

	b. Ancaman :				
	1. Pendapatan masih rendah / belum mencukupi biaya rutin	22	4	88	I
	2. Aplikasi teknologi tepat guna mahal	20	3	60	III
	3. SDM masyarakat rendah	19	2	38	IV
	4. Naiknya angka pengangguran	21	4	84	II
	5. adanya unjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah	18	2	36	V
	<b>100</b>				

**KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN  
ANALISIS UNTUK MENENTUKAN ISU - ISU STRATEGIK**

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR KEKUATAN	FAKTOR KELEMAHAN
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008</li> <li>Jabatan struktural sudah terisi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jabatan fungsional belum terisi</li> <li>Biaya operasional kurang</li> </ol>
<b>FAKTOR PELUANG</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi ekonomi tinggi</li> <li>Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi</li> </ol>	<b>FAKTOR PENDORONG</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan Potensi ekonomi tinggi</li> <li>SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi</li> <li>Jabatan struktural sudah terisi dan Potensi ekonomi tinggi</li> <li>Jabatan struktural sudah terisi dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi</li> </ol>	<b>FAKTOR MOBILISASI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jabatan Fungsional belum terisi dan Potensi ekonomi tinggi</li> <li>Jabatan Fungsional belum terisi dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi</li> <li>Biaya operasional kurang dan Potensi ekonomi tinggi</li> <li>Biaya operasional kurang dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi</li> </ol>
<b>FAKTOR ANCAMAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan rendah</li> <li>SDM masyarakat rendah</li> </ol>	<b>FAKTOR DEVESTASI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan Pendapatan rendah</li> <li>SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan SDM masyarakat</li> <li>Jabatan struktural sudah terisi dan Pendapatan rendah</li> <li>Jabatan struktural sudah terisi dan SDM rendah</li> </ol>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jabatan Fungsional belum terisi dan Pendapatan rendah</li> <li>Jabatan Fungsional belum terisi dan SDM masyarakat rendah</li> <li>Biaya operasional kurang dan Pendapatan rendah</li> <li>Biaya operasional kurang dan SDM masyarakat rendah</li> </ol>

Analisa faktor stratejik untuk menentukan faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut :

No	FAKTOR STRATEJIK	BOBOT	RATING TERHADAP				SKOR	FPK
			VISI	MISI	NILAI	JML		
I.	<b>PENDORONG</b>							
	1. SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan Potensi ekonomi tinggi	30	4	4	4	12	360	I
	2. SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi	20	2	3	3	8	160	XII
	3. Jabatan struktural sudah terisi dan Potensi ekonomi tinggi	22	2	2	3	7	154	XIII
	4. Jabatan struktural sudah terisi dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi	28	4	3	3	10	280	IV
		<b>100</b>						
II.	<b>MOBILISASI</b>							
	1. Jabatan Fungsional belum terisi dan Potensi ekonomi tinggi	27	4	3	3	10	270	VI
	2. Jabatan Fungsional belum terisi dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi	21	3	3	2	8	168	X
	3. Biaya operasional kurang dan Potensi ekonomi tinggi	23	3	3	1	7	161	XI
	4. Biaya operasional kurang dan Partisipasi masyarakat dlm pembangunan tinggi	29	4	4	3	11	319	III
		<b>100</b>						
III.	<b>DEVESTASI</b>							
	1. SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan Pendapatan rendah	31	3	3	3	9	279	V
	2. SOT sudah berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2008 dan SDM masyarakat	19	2	2	1	5	95	XVI
	3. Jabatan struktural sudah terisi dan Pendapatan rendah	28	3	3	2	8	224	VIII
	4. Jabatan struktural sudah terisi dan SDM rendah	22	2	3	3	8	176	IX
		<b>100</b>						
IV.	<b>PENGHAMBAT</b>							
	1. Jabatan Fungsional belum terisi dan Pendapatan rendah	20	2	2	3	7	140	XIV
	2. Jabatan Fungsional belum terisi dan SDM masyarakat rendah	19	2	2	1	6	114	XV
	3. Biaya operasional kurang dan Pendapatan rendah	32	3	4	3	10	320	II
	4. Biaya operasional kurang dan SDM masyarakat rendah	29	3	3	3	9	261	VII
		<b>100</b>						

#### b. KEBIJAKAN

Kebijakan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pematang Jaya adalah Pemantapan Stabilitas, Ketentraman dan Ketertiban Daerah.



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pemalang masuk dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Ketertiban dan Keamanan yang dibagi dalam 2 (dua) Sub Program, yaitu : Ketertiban, Keamanan dan Hukum Lainnya dan Penanggulangan Bencana. Program dan kegiatan tersebut sebagaimana terlampir dalam form : 2.1. dan 2.2.

#### **5.1 RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH DAERAH DAN KEGIATAN KANTOR KESBANG DAN LINMAS**

Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pemalang Bidang/ Urusan, Program dan Kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Bidang/ urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya meliputi :
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
    - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ;
    - Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
    - Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan ;
    - Penyediaan Jasa Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor ;
    - Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor ;
    - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ;
    - Penyediaan Jasa Keamanan.
  - b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya meliputi :
    - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ;
    - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ;
    - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan ;
    - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler.
  - c. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, kegiatannya meliputi :
    - Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;
    - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
    - Pengendalian Keamanan Lingkungan ;
    - Pembinaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ;
  - d. Program : Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, kegiatannya meliputi :
    - Peningkatan Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah ;
  - e. Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya meliputi :
    - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat ;

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa/ FPBI.
  - Peningkatan Rasa Kesadaran Bela Negara .
  - Peningkatan Pemahaman Idiologi Negara.
- e. Program : Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, kegiatannya meliputi :
- Penyusunan Data Base Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
  - Penyuluhan Trantibum dan Penegakan Perda/ FKUB
  - Fasilitasi Pemberdayaan FKDM
  - Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas/ LSM.
- f. Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), kegiatannya meliputi :
- Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Pengguna Minuman Keras dan Narkoba ;
  - Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- g. Program : Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatannya meliputi :
- Penyuluhan kepada Masyarakat.
  - Koordinasi Forum2 Diskusi Politik.
  - Penyusunan Data Base Partai politik.
  - Peningkatan dan Penguatan Peran Politik, Ormas/ LSM dan Tomas/ Toga.
- h. Program : Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam, kegiatannya meliputi :
- Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.

## **5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN KESBANG, POL DAN LINMAS**

Program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kesbang dan Linmas Kabupaten Pematang adalah :

1. Melakukan kegiatan untuk mengembangkan pengamalan Ideologi Pancasila dan pembinaan kesatuan bangsa serta menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka terwujudnya stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya ;
2. Melaksanakan, merumuskan program perlindungan masyarakat serta pengendalian kegiatan segala bentuk bencana dan kekacauan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia, baik langsung maupun tidak langsung ;
3. Meningkatkan kemandirian, efektifitas, fungsi dan partisipasi Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
4. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komperhensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta perlindungan masyarakat.

Tabel 5.1 terlampir

## **BAB VI**

Renstra Kantor Kesbang dan Linmas 2011 – 2016 disusun sebagai pedoman/ landasan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif.

Renstra Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pemalang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif dan mengorganisasi-kannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula.

Menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. (Tabel 6.1 terlampir)

Akhirnya semoga Rencana Strategik ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

## **BAB VII PENUTUP**

Renstra Kantor Kesbang dan Linmas 2011 – 2016 disusun sebagai pedoman/landasan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Betapapun tingkat kinerja yang diinginkan mungkin saja masih bersifat subyektif.

Renstra Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Pemalang merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, antisipatif dan mengorganisasi-kannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis pula.

Menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. (Tabel 6.1 terlampir)

Akhirnya semoga Rencana Strategik ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 19 Setember 2011

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

**AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.**  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.



Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2011  
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

Lembar : 1

SKPD : Kantor Kesbang Pol dan Linmas

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3 2011)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	19	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Adm perkantoran					
1	19	01	01	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
1	19	01	02	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
1	19	01	03	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
1	19	01	08	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						
1	19	01	09	• Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor						
1	19	01	10	• Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan						
1	19	01	11	• Penyediaan Jasa Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor						
1	19	01	12	• Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor						
1	19	01	18	• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						
1	19	01	19	• Penyediaan Jasa Keamanan						
1	19	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas se-hari2					
1	19	02	10	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						

1	19	02	22	• Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor									
1	19	02	23	• Pemeliharaan Rutin Berkala/ Mobil Jabatan									
1	19	02	29	• Pemeliharaan Rutin Berkala/ Mebeler									
1	19	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kelancaran pelaks pemerintah & pembangunan								
1	19	15	01	• Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
1	19	15	03	• Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
1	19	15	05	• Pengendalian Keamanan Lingkungan									
1	19	15	07	• Pembinaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
1	19	16		Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningk ketentraman & ketertiban masy								
1	19	16	05	• Peningkatan Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah									
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman ttg wawasan kebangsaan								
1	19	17	02	• Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat/ FPBI									
1	19	17	03	• Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa/ Wasbang									

1	19	17	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Rasa Kesadaran Bela Negara</li> </ul>									
1	19	17	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pemahaman Idiologi Negara</li> </ul>									
1	19	19		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase penyelesaian konflik & tertib adm data								
1	19	19	02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Data Base Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya masyarakat</li> </ul>									
1	19	19	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan Trantibum dan Penegakan Perda/ FKUB</li> </ul>									
1	19	19	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pemberdayaan utk menjaga ketertib &amp; keamanan/ FKDM</li> </ul>									
1	19	19	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Kerjasama Depdagri &amp; Pemerintah Daerah dengan Ormas &amp; LNL</li> </ul>									
1	19	20		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penyuluhan & test urine								
1	19	20	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Pengguna Minuman Keras dan Narkoba</li> </ul>									
1	19	20	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</li> </ul>									
1	19	21		Pendidikan Politik Masyarakat	Penyuluhan politik masy								
1	19	21	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan kepada Masyarakat</li> </ul>									
1	19	21	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Fom2 Diskusi Plitik</li> </ul>									
1	19	21	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Data Base Partai Politik</li> </ul>									
1	19	21	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan Penguatan Peran Politik, Ormas/ LSM dan Tomas/ Toga</li> </ul>									



1	19	22		Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam	Informasi bencana alam								
1	19	22	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam</li> </ul>									

KEPALA KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
SKPD Kantor Kesbang Pol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2010 (thn n-2)	Tahun 2010 (thn n-1)	Tahun 2011 (thn n)	Tahun 2012 (thn n+1)	Tahun 2010 (thn n-2)	Tahun 2011 (thn n-1)	Tahun 2012 (thn n)	Tahun 2012 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang di kelola											
2.	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik											
3.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan											
4.	Jumlah jenis peralatan kebersihan											
5.	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli											
6.	Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan											

7.	Tersedianya komponen instalasi / penerangan bangunan kantor											
8.	Tersedianya makanan dan minuman kantor											
9.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah											
10.	Jumlah petugas piket dan sopir yang dapat honor											
11.	Jumlah gedung kantor yang terpelihara											
12.	Jumlah kendaraan yang terpelihara											
13.	Jumlah mebeleur yang terpelihara											
14.	Jumlah tenaga pengendali keamanan yang di siapkan											
15.	Jumlah org yang ikut pelatihan administrasi bantuan keuangan parpol											
16.	Jumlah org yang ikut pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan											
17.	Jumlah org yang ikut penyiapan petugas posko dan pengamanan PILEG, PILPRES, PILGUB dan PEMILUKADA (TNI, Polri)											
18.	Penyiapan petugas posko dan pam PILEG, PILPRES, PILGUB dan PEMILUKADA											
19.	Jumlah tenaga kominda											
20.	Jumlah tenaga FKDM											
21.	Jumlah peserta tenaga pengamanan PILEG, PILPRES, PILGUB dan PEMILUKADA (Linmas)											
22.	Jumlah pam patroli, dan pam RI 1 dan pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru											
23.	Pembinaan Hansip/ Linmas											
24.	Pembentukan dan pelatihan Hansip/ Linmas di Kab Pematang											
25.	Peringatan hari jadi Kab Pematang ke 434											
26.	Jumlah yang mengikuti pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)											
27.	Jumlahorg yang ikut penyelenggaraan Forum Wasbang dan Orketbang											
28.	Jumlah data base ormas, yayasan dan LSM											

29.	Jml rakor dan monitoring kerukunan umat beragama											
30.	Jumlah pelajar dan mahasiswa yang di suluh											
31.	Jumlah anggota OKP yang test urine											
32.	Penyuluhan politik kepada generasi muda											
33.	Terlaksananya desk Pileg dan Pilpres 2009 dan sosialisasi											
34.	Jumlah frekuensi pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam											

KEPALA KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2011  
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

Lembar .....dari.....

SKPD : Kantor Kesbang Pol dan Linmas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuuh Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pengaku Kepentingan Tahun 2012  
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

SKPD : Kantor Kesbang Pol dan Linmas

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pelayanan Adm. Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat				
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik				
	3. Penyediaan jasa peral. & perlkn ktr				
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor				
	5. Penyediaan alat tulis kantor				
	6. Penyediaan jasa brg cetakan & penggand				
	7. Penyediaan komp instalasi listrik/ penerangan bang. ktr				
	8. Penyediaan makanan dan minuman ktr				
	9. Rapat-2 koord & konsl ke luar daerah				
	10. Penyediaan jasa keamanan				
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan computer & perlengkapannya				
	2. Pemel rutin/ berkala gedung kantor				
	3. Pemel rutin/ berkala mobil jabatan				
3.	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan				
	1. Penyiapan tanaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingk				
	2. Pelatihan pengendian keamanan & kenyamanan lingk				
	3. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingk				

	4. Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingk				
4.	Pemeliharaan Kamtrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal				
	Peningkatan aparat dlm rangka siskamswakarsa di daerah				
5.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
	1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kal masy				
	2. Peningkatan kesadaran masy akan nilai-2 luhur bdy bgs				
6.	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan				
	1. Penyusunan data base, Yayasan & LSM				
	2. Penyuluhan trantibum & penegakan perda				
7.	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)				
	1. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras & narkoba				
	2. Fasilitasi pencegahan penyalhgunaan narkoba				
8.	Pendidikan politik masyarakat				
	1. Penyuluhan kepada masyarakat				
	2. Koord. Forum2 diskusi politik				
9.	Pencegahan dini dlm Penagg. Korban Bencal				
	Pemantauan & penyebarluasan informasi potensi bencal				

Tabel 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2011  
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pemalang

Lembar .....dari.....

SKPD : Kantor Kesbang Pol dan Linmas

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2012				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun.....	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	19	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Adm perkantoran							
1	19	01	01	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
1	19	01	02	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
1	19	01	03	• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
1	19	01	08	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor								
1	19	01	09	• Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor								
1	19	01	10	• Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan								
1	19	01	11	• Penyediaan Jasa Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor								
1	19	01	12	• Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor								
1	19	01	18	• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								
1	19	01	19	• Penyediaan Jasa Keamanan								
1	19	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas se- hari2							

1	19	02	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> </ul>								
1	19	02	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor</li> </ul>								
1	19	02	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Rutin Berkala/ Mobil Jabatan</li> </ul>								
1	19	02	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Rutin Berkala/ Mebeler</li> </ul>								
1	19	15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kelancaran pelaks pemerintah & pembangunan							
1	19	15	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> </ul>								
1	19	15	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> </ul>								
1	19	15	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Keamanan Lingkungan</li> </ul>								
1	19	15	07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> </ul>								
1	19	16		Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningk ketentraman & ketertiban masy							
1	19	16	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah</li> </ul>								
1	19	17		Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pemahaman ttg wawasan kebangsaan							
1	19	17	02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat/ FPBI</li> </ul>								
1	19	17	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa/ Wasbang</li> </ul>								
1	19	17	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Rasa Kesadaran Bela Negara</li> </ul>								

1	19	17	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pemahaman Idiologi Negara</li> </ul>								
1	19	19		Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase penyelesaian konflik & tertib adm data							
1	19	19	02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Data Base Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya masyarakat</li> </ul>								
1	19	19	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan Trantibum dan Penegakan Perda/ FKUB</li> </ul>								
1	19	19	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pemberdayaan utk menjaga ketertib &amp; keamanan/ FKDM</li> </ul>								
1	19	19	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Kerjasama Depdagri &amp; Pemerintah Daerah dengan Ormas &amp; LNL</li> </ul>								
1	19	20		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penyuluhan & test urine							
1	19	20	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Pengguna Minuman Keras dan Narkoba</li> </ul>								
1	19	20	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</li> </ul>								
1	19	21		Pendidikan Politik Masyarakat	Penyuluhan politik masy							
1	19	21	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan kepada Masyarakat</li> </ul>								
1	19	21	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Fom2 Diskusi Politik</li> </ul>								
1	19	21	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Data Base Partai Politik</li> </ul>								
1	19	21	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan Penguatan Peran Politik, Ormas/ LSM dan Tomas/ Toga</li> </ul>								
1	19	22		Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam	Informasi bencana alam							
1	19	22	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam</li> </ul>								



NAMA SKPD : KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG.  
RENSTRA SKPD PERIODE : 2011 – 2016

No	BIDANG/ URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN	INDIKASI KEGIATAN		PAGU INDIKATIF LIMA TAHUNAN DAN SATU TAHUN TRANSISI		KETERANGAN (MITRA SKPD / LOKASI)
				KERANGKA ANGGARAN	KERANGKA REGULASI	Rp.	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	A. SKPD  1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	-  -	-  -	7.335.000  25..995..000	APBD Kab. Pemalang  APBD Kab. Pemalang	Lokasi : Kabupaten Pemalang  Lokasi : Kabupaten Pemalang

			1.1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	10.000.000	APBD Kab. Pematang	
			1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	2.000.000	APBD Kab. Pematang	
			1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	7.000.000	APBD Kab. Pematang	
			1.5. Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	15.420.000	APBD Kab. Pematang	
			1.7. Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bang Kantor	-	-	3.000.000	APBD Kab. Pematang	
			1.8. Makanan dan Minuman Kantor	-	-	26.900.000	APBD Kab. Pematang	
			1.9. Rapat-2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	-	40.850.000	APBD Kab. Pematang	
			1.10. Penyediaan Jasa Keamanan	-	-	13.650.000	APBD Kab. Pematang	
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	40.000.000	APBD Kab. Pematang	

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	-	15.000.000	APBD Kab. Pematang	
			2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	-	-	20.000.000	APBD Kab. Pematang	
			2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler	-	-	2.000.000	APBD Kab. Pematang	
		3. Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	3.1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	40.000.000	APBD Kab. Pematang	
			3.2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Hansip/ Linmas)			40.000.000	APBD Kab. Pematang	
			3.3. Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	-	265.800.000	APBD Kab. Pematang	

			3.4. Pembinaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	47.250.000	APBD Kab. Pemalang	
		4. Pemeliharaan Kamtramtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	4.1. Peningkatan Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	-	-	41.158.000	APBD Kab. Pemalang	
		5. Pengembangan Wasbang	5.1. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masy	-	-	30.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			5.2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	30.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		6. Pemberdayaan Masy utk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.1. Penyusunan Data Base Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat	-	-	45.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			6.2. Penyuluhan Trantibum dan Penegakan Perda	-	-	50.000.000	APBD Kab. Pemalang	

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masy (Pekat)	7.1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Pengguna Minuman Keras dan Narkoba	-	-	40.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			7.2. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.	-	-	40.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		8. Pendidikan Politik Masyarakat	8.1. Penyuluhan kepada Masyarakat	-	-	40.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			8.1. Koord. Forum2 Diskusi Politik	-	-	41.000.000		
			8.1. Penyusunan Data Base Partai Politik	-	-	75.000.000		

			8.1. Peningk. Dan Penguatan Peran Politik, Ormas/ LSM & Tomas/ Toga	-	-	60.000.000		
		9. Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Korban Bencal	9.1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	-	-	52.492.000	APBD Kab. Pemalang	
		B. LINTAS SKPD	-	-	-	-	-	-
		C. KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

Form : 2.2.

Matrik Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2012

NAMA SKPD : KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG.  
RENJA SKPD : TAHUN 2012

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR KELUARAN	INDIKASI KEGIATAN		PAGU INDIKATIF TAHUN 2012		KETERANGAN (MITRA SKPD/ LOKASI)
				KERANGKA ANGGARAN	KERANGKA REGULASI	Rp.	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	B. SKPD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik	- -	- -	7.335.000 25.995.000	APBD Kab. Pemalang APBD Kab. Pemalang	Lokasi : Kabupaten Pemalang

		1.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	12.000.000	APBD Kab. Pematang	
		1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	2.000.000	APBD Kab. Pematang	
		1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	7.000.000	APBD Kab. Pematang	
		1.6. Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	12.620.000	APBD Kab. Pematang	
		1.7. Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bang Kantor			3.000.000	APBD Kab. Pematang	
		1.8. Makanan dan Minuman Kantor			26.900.000	APBD Kab. Pematang	
		1.9. Rapat-2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			50.000.000	APBD Kab. Pematang	
		1.10. Penyediaan Jasa Keamanan			13.650.000	APBD Kab. Pematang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	50.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	-	60.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	-	-	50.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler	-	-	5.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	-	-	40.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			3.2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	100.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			2.3. Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	-	450.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			3.4. Pembinaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	55.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		4. Pemel. Kam-tramtib mas & Pencegahan Tindak Kriminal	4.1. Peningkatan aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	-	-	60.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5.1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	-	-	30.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			5.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa/ FPBI	-	-	30.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			5.3. Peningkatan kesadaran bela negara			30.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			5.4. Peningkatan pemahaman ideologi negara			30.000.000	APBD Kab. Pemalang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Pemberdayaan Masyarakat utk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	6.1. Penyusunan data base Ormas, Yayasan dan LSM	-	-	75.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			6.2. Penyuluhan Trantibum dan Penegakan Perda	-	-	75.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			6.3. Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan ormas/ LSM			50.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			6.4. Fasilitasi pemberdayaan utk menjaga ketertiban dan keamanan (FKDM)			90.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		7. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masy (Pekat)	7.1. Penyuluhan pencegahan peredaran pengguna Minuman keras dan narkoba	-	-	50.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			7.2. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba			50.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		8. Pendidikan Politik Masyarakat	8.1. Penyuluhan kepada Masyarakat	-	-	60.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			8.2. Koord. Forum2 Diskusi Politik			40.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			8.3. Penyusunan Data Base Partai Politik			75.000.000	APBD Kab. Pemalang	
			8.4. Peningk. Dan Penguatan Peran Politik, Ormas/ LSM & Tomas/ Toga			60.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		9. Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam	9.1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	-	50.000.000	APBD Kab. Pemalang	
		A. LINTAS SKPD	-	-	-	-	-	-
		B. KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

## Matrik Program Tahunan SKPD

NAMA SKPD : KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG.  
 RENSTRA SKPD PERIODE : 2011 – 2016  
 URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN		PAGU INDIKATIF														
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2010)	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015		
				Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	A. BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	152.151	149.300	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	160.500	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	160.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	161.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	162.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	457.610	77.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	165.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	166.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	167.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	168.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang
	3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		1.460.650	393.050	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	645.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	1.210.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	1.310.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	1.470.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang
	4. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		60.000	41.158	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	60.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	70.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	80.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	90.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang
	5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan		40.000	60.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	120.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	120.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	120.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	120.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6. Pemberdayaan Masyarakat utk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		132.250	95.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	290.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	300.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	300.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	300.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	7. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masy (Pekat)		40.000	80.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	100.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	120.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	140.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	160.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	8. Pendidikan Politik Masyarakat		555.250	81.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	235.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	1.130.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	1.140.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	1.000.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	9. Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam		67.038	52.492	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	50.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	60.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	70.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	80.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	A. LINTAS SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

## RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN DAN PROGRAM	INDIKATOR HASIL	ANGGARAN (dalam jutaan rupiah)					
				ALOKASI TA. 2011	ALOKASI TA. 2012	ALOKASI TA. 2013	ALOKASI TA. 2014	ALOKASI TA. 2015	ALOKASI TA. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kewenangan Wajib	1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
		1 19 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib administrasi perkantoran	149.300	160.500	160.000	161.000	162.000	
		1 19 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari	77.000	165.000	166.000	167.000	168.000	
		1 19 15 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kelancaran pelaksanaan pembangunan	393.050	645.000	1.210.000	1.310.000	1.470.000	
		1 19 16 Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pen-cegahan Tindak Kriminal	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	41.158	60.000	70.000	80.000	90.000	
		1 19 17 Pengembangan Wawasan kebangsaan	Pemahaman tentang Wawasan kebangsaan	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		1 19 19 Pemberd. Masy. Utk Menjaga Ketertiban & Keamanan	Tertib adminitrasi data (Ormas, Yayasan & LSM) dan Penyelesaian konflik	95.000	290.000	300.000	300.000	300.000	
		1 19 20 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masy (Pekat)	Penyuluhan dan test urine	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	

1	2	3	4	5		6		7	
		1 19 21 Pendidikan Politik Masyarakat	Penyuluhan politik masyarakat	81.000	235.000	1.130.000	1.140.000	1.000.000	
		1 19 22 Pencegahan Dini Dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam	Infomasi bencana alam	52.492	50.000	60.000	70.000	80.000	

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

## RINCIAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

## KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG

JENIS KEBIJAKAN DAN KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	SASARAN TA. 2011	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	ALOKASI TA. 2011	INDISKASI ANGGARAN TA. 2011 (dalam jutaan rupiah)						PRAKIRAAN TA. 2012	SUMBER PEMBIAYAAN
					Rupiah Murni				PHLN			
					1	2	3	4	PLN	Hibah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	(8)
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
Penyediaan jasa surat menyurat	% Jml surat yg terkirim	Pelayanan Adm. Surat menyurat	Kasubag TU	7.335.000	1.833	1.833	1.833	1.836	-	-	7.335.000	Dana Alokasi Umum
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jml jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Penyediaan jasa komunikasi	Kasubag TU	25.995.000	6.498	6.498	6.498	6.501	-	-	25.995.000	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jml peralatan & perlengk. Kantor	Penyediaan peralatan & perlengk. Kantor	Kasubag TU	10.000.000	2.728	2.728	2.728	1.816	-	-	12.000.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis kebersihan yg dibutuhkan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kasubag TU	2.000.000	501	501	501	497	-	-	2.000.000	
Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jml Atk yg di butuhkan	Penyediaan atk	Kasubag TU	7.000.000	1.749	1.749	1.749	1.753	-	-	7.000.000	
Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Jml brg cetakan & penggandaan thd kebutuhan	Penyediaan brg cetakan & penggandaan	Kasubag TU	15.420.000	4.329	2.429	3.131	3.531	-	-	12.620.000	
Penyediaan jasa komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jml komp. Instalasi	Penyediaan komponen instalasi	Kasubag TU	3.000.000	750	750	750	750	-	-	3.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jml makanan & minuman yg tersedia	Jml makanan & minuman yg dibutuhkan	Kasubag TU	26.900.000	6.726	6.726	6.726	6.722	-	-	26.900.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	(8)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koord & konsul kedalam & keluar	Rapat2 koord & konsul keluar daerah	Kasubag TU	40.850.000	9.501	9.501	10.920	10.928	-	-	50.000.000	
Penyediaan jasa keamanan	Terpenuhinya jml tenaga keamanan	Pelayanan keamanan kantor	Kasubag TU	13.650.000	3.414	3.414	3.414	3.408	-	-	13.650.000	
Pengadaan Komputer PC	Tersedianya computer PC	Tersedianya computer yg memadai	Kasubag TU	40.000.000	36.900	-	3.100	-	-	-	-	
Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya AC & Sound Sistem	Tersedianya AC & Sound Sistem yg memadai	Kasubag TU	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharnya 1 gedung secara rutin	Pemekliharaan rutin gd./ kantor	Kasubag TU	15.000.000	3.750	3.750	3.750	3.750	-	-	60.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jml mobil terpelihara scr rutin	Pemeliharaan mobil jabatan	Kasubag TU	25.440.000	4.997	4.997	4.997	5.007	-	-	50.000.000	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeler	Jml mebeler yg terpelihara	Pemeliharaan rutin	Kasubag TU	2.000.000	1.000	1.000	-	-	-	-	5.000.000	
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pemb. Tenaga pengendali	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kasi Linmas	295.800.000	139.626	42.677	106.104	7.391	-	-	450.000.000	
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Tenaga pengendali keamanan lingk.	Peningk. Tugas pokok & fungsi Hansip/Linmas	Kasi Linmas	40.000.000	11.050	28.950	-	-	-	-	40.000.000	
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jml peserta pelatihan	Pelatihan bagi Linmas	Kasi Linmas	40.000.000	-	40.000	-	-	-	-	100.000.000	
Pembinaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pemb. Hansip/ Linmas	Pelatihan / Diklat/ tali Asih/ santunan & perawatan bagi anggota Hansip	Kasi Linmas	51.200.000	16.660	24.310	8.254	1.975	-	-	55.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	(8)
Peningkatan aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Pembt. Linmas Inti di Daerah	Peningk. Aparat dlm rangka pelaks. Siskamswakarsa	Kasi Linmas	47.093.000	14.91 1	13.71 1	17.29 6	1.175	-	-	60.000.000	
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jml peserta Forum persaudaraan Bgs Ind.	Terpeliharanya persatuan & Kesatuan bgs.	Kasi KKB	30.000.000	15.15 6	8.256	6.141	447	-	-	30.000.000	
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-2 luhur budaya bangsa	Penyelenggaraan Forum Wasbang & Orketbang	Masy. Di Kab. Pematang	Kasi KKB	30.000.000	30.00 0	-	-	-	-	-	30.000.000	
Penyusunan data base Ormas, Yayasan dan LSM	Jml data base, ormas yayasan & LSM	Terautentifikasinya data base	Kasi Poldagri	45.000.000	13.42 0	5.590	25.99 0	-	-	-	75.000.000	
Penyuluhan Trantibum dan Penegakan Perda	Jml penyul. Rakor & monitoring kerukunan umat beragama	Penyuluhan dll.	Kasi Poldagri	60.675.000	22.80 0	15.08 5	20.87 0	1.920	-	-	75.000.000	
Fasilitasi kerjasama pemerintah daerah dengan ormas/ LSM	Jml ormas/ LSM yang difasilitasi	Penyuluhan dll.	Kasi Poldagri	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	
Fasilitasi pemberdayaan utk menjaga ketertiban dan keamanan/ FKDM	Jml penyuluhan dan rakor monitoring	Sosialisasi/ rakor dll.	Kasi KKB	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000	
Penyuluhan pencegahan peredaran pengguna Minuman keras dan narkoba	Jml generasi yg di suluh	Masyarakat Kab. Pematang	Kasi Poldagri	40.000.000	4.590	-	35.41 0	-	-	-	50.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	(8)
Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jml ormas/ LSM/ pelajar yang di suluh	Masyarakat Kab. Pemalang	Kasi Poldagri	40.000.000	-	-	40.000	-	-	-	50.000.000	
Penyuluhan kepada Masyarakat	Jml masyarakat yang di suluh	Masyarakat Kab. Pemalang	Kasi Poldagri	65.000.000	3.004	9.013	52.982	-	-	-	60.000.000	
Koord forum2 diskusi politik	Jml peserta rakor	Partai Politik Kab. Pemalang	Kasi Poldagri	59.150.000	15.765	12.942	28.142	2.300	-	-	40.000.000	
Penyusunan data base partai politik	Jml partai politik	Partai Politik Kab. Pemalang	Kasi Poldagri	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	
Peningkatan & penguatan peran politik, Ormas/ LSM & Tomas/ Toga	Jml peserta sosialisasi	Masyarakat Kab. Pemalang	Kasi Poldagri	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jml pemantauan & penyebarluasan informasi & pencegahan Bencal	Pelayanan informasi Bencal	Kasi Linmas	52.492.000	24.213	13.820	14.458	-	-	-	50.000.000	

Kolom (6) No.3 Belanja Perjalanan Dinas

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011  
KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCAM		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yg dikelola	100%	Jumlah surat yang terkirim & surat masuk	100%	7,335,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik terhadap kebutuhan yg direncanakan	100%	25,995,000.00
		Pelayanan peralatan & perlengkapan kantor	Jml peralatan & perlengkapan kantor yg diadakan	100%	Tugas kedinasan menjadi lancar	100%	10,000,000.00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	100%	Kebersihan kantor dapat terjaga	100%	2,000,000.00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg dibeli/tersedia	100%	Jumlah alat tulis kantor terhadap kebutuhan	100%	7,000,000.00
		Pelayanan Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml tersedianya barang cetakan & penggandaan	100%	Jumlah barang cetak & penggandaan yg tercukupi terhadap kebutuhan	100%	15,420,000.00
		Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	100%	Keamanan & kenyamanan dlm pelaksanaan tugas kedinasan	100%	3,000,000.00
		Penyediaan makanan & minuman kantor	Tersedianya makanan minuman tamu & pegawai	100%	Tersedianya makanan minuman terhadap kebutuhan	100%	26,900,000.00
		Rapat-2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jml penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	rencana tindak lanjut kegiatan	100%	40,850,000.00
		Pelayanan keamanan sehari-hari	Terbayarnya petugas piket	100%	Penyelesaian tugas kedinasan dan penyelesaian masalah-masalah bencana alam	100%	13,650,000.00



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Sarana & Prasaran Aparatur	Pengadaan komputer & perlengkapannya	Tersedianya komputer note book	100%	Tersedianya komputer yang memadai	100%	40,000,000.00
		Pemeliharaan gedung kantor	Jml gedung kantor yang terpelihara	100%	Gedung kantor tempat bekerja menjadi lebih baik & nyaman	100%	15,000,000.00
		Pemeliharaan mobil dinas kantor	Jml kendaraan yang terpelihara	100%	Kendaraan dinas dalam keadaan baik & terpelihara	100%	25,440,000.00
		Pemeliharaan mebelair kantor	Jml mebelair yang terpelihara	100%	Mebelair dalam keadaan baik terhadap kebutuhan yg direncanakan	100%	2,000,000.00
3	Peningkatan keamanan & kenyamanan lingk.	Peningkatan tugas pokok & fungsi Hansip/ Linmas tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jml tenaga pengendali keamanan yg disiapkan	100%	Peningkatan keamanan masyarakat lebih terjamin	100%	40,000,000.00
		Palatihan bagi Linmas / Latihan & Ketrampilan Perlindungan Masyarakat	Jml org yg ikut Pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingk.	100%	Peningkatan sumber daya manusia	100%	40,000,000.00
		Membantu menjaga keamanan & ketertiban daerah	Jml org yg ikut penyiapan petugas Posko & PAMRI, KOMINDA, FKDM, PAM Patroli, 1 & PAM Lebaran-Tahun Baru.	100%	Keamanan & ketertiban daerah dapat terjaga	100%	295,800,00.00
		Pembinaan, Diklat, Perawatan, Tali Asih & Santunan Anggota HANSIP	Jumlah HANSIP/ LINMAS yang mendapatkan tali asih dan santunan	100%	Meningkatkan kesejahteraan HANSIP/ LINMAS	100%	51,200,000.00
4	Pemel. Kanrantibmas & pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dlm rangka pelaks siskamswakarsa di daerah	Jumlah HANSIP/ LINMAS inti yang terlatih di Kabupaten Pemalang	100%	Sumber daya manusia aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dapat meningkat	100%	47,093,000.00
5	Pengembangan wawasan kebangsaan	Terpeliharanya persatuan & kesatuan bangsa	Jumlah peserta Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	100%	Terpeliharannya Forum Persaudaraan Bangsa. Indonesia (FPBI)	100%	30,000,000.00
		Terpeliharanya persatuan & kesatuan bangsa	Jml orang yang ikut penyelenggaraan Forum Wawasan Kebangsaan dan Orientasi Ketahanan Bangsa	100%	Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Orientasi Ketahanan Bangsa	100%	30,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pemberdayaan masy. untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terautentifikasinya data base & pembinaan Ormas, Yayasan & LSM	Diketahuinya jumlah data base ormas, yayasan & LSM	100%	Teridentifikasinya data autentifikasi Ormas, Yayasan & LSM.	100%	45,000,000.00
7	Peningkatan pemberantasan penyakit masy. (pekat)	Penyuluhan, Rakor dan monitoring kerukunan umat beragama	Terciptanya kerukunan umat bergama/sosialisasi FKUB	100%	Konflik antar inter umat beragama dapat ditekan	100%	60,675,000.00
		Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar & mahasiswa	Jml pelajar & mahasiswa yang disuluh	100%	Meningkatkan pengetahuan pelajar dan mahasiswa tentang bahaya minuman keras dan narkoba	100%	40,000,000.00
		Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jml peserta yang di suluh	100%	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg bahaya narkoba	100%	40.000.000.00
8	Pend. Politik masy.	Penyuluhan kepada masyarakat	Jml masyarakat yang di suluh	100%	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg politik	100%	65,000,000.00
		Forum2 diskusi politik	Jml peserta rakor	100%	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg politik	100%	59.150.000.00
9	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pelayanan informasi bencana alam	Jml frekuensi Pemantauan dan Penyeberluasan Informasi Bencana Alam	100%	Kegiatan pemantauan bencana alam dapat direncanakan dengan baik	100%	52,492,000.00
					<b>Jumlah</b>		<b>1,129,000,000.00</b>

Menyetujui :  
BUPATI PEMALANG

**H. JUNAEDI, SH, MM**

Pemalang, Januari 2011

KEPALA KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS

**AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.**

PERMASALAHAN/ ISUE YANG DIHADAPI DAN PENANGANAN SKPD PADA TAHUN RENCANA

No	POKOK PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH	SARAN/ MASUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Bencana Alam di Kabupaten Pematang	Bencana Alam Tanah Longsor Di Daerah Punggung dan Angin Lisus serta Banjir di Daerah Pantura	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mengaktifkan Posko Satlak PBP selama 24 jam</li> <li>· Mengadakan ceking ke lokasi bencana</li> <li>· Memberikan bantuan tanggap darurat kpd korban</li> </ul>	Mencarikan tanah relokasi utk pemindahan korban ke tempat yang lebih aman dan Dinas/ Instansi terkait dalam Satlak PBP untuk proaktif	-

KEPALA KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

LAMPIRAN 1 : USULAN PERUBAHAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011

SKPD : KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG

No	URAIAN	SASARAN PROG/ KEGIATAN	TARGET (%)	BELANJA						BERTAMBAH/ BERKURANG		
				SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			Rp.	%	
				PEGAWAI	BRG/ JASA	MODAL	PEGAWAI	BRG/ JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program : Gaji dan Tunjangan	-	100 %	1.006.691.000,-	-	-	1.056.050.000,-	-	-	-	31.150.000,-	0,095
JUMLAH												
2.	Program : Pelayanan Adm. Perkantoran											
2.1	Kegiatan : 11. Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat	100 %	-	7.335.000,-	-	-	7.335.000,-	-	-	-	-
	12. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 %	-	25.995.000,-	-	-	25.995.000,-	-	-	-	-
2.2	13. Penyediaan jasa peral. & perlkp ktr	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	-	10.000.000,-	-	-	10.000.000,-	-	-	-	-
2.3	14. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	100 %	-	2.000.000,-	-	-	2.000.000,-	-	-	-	-
2.4	15. Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	100 %	-	7.000.000,-	-	-	7.000.000,-	-	-	-	-
2.5	16. Penyediaan jasa brg cetakan & penggand	Jasa brg cetakan & penggand	100 %	5.700.000,-	9.720.000,-	-	-	13.420.000,-	-	-	-	-
2.6	17. Penyediaan komp instalasi listrik/ penerangan bang. ktr	Komp instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	-	3.000.000,-	-	-	3.000.000,-	-	-	-	-
2.7	18. Penyediaan makanan dan minuman ktr	Makanan dan minuman kantor	100 %	-	26.900.000,-	-	-	26.900.000,-	-	-	-	-
2.8	19. Rapat-2 koord & konsl ke luar daerah	Rapat-2 koord & konsl ke luar daerah	100 %	-	38.000.000,-	-	-	40.850.000,-	-	-	-	-
2.9	20. Penyediaan jasa keamanan	Jasa keamanan kantor	100 %	13.650.000,-	-	-	13.650.000,-	-	-	-	-	-
JUMLAH												
3.	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
3.1	4. Pengadaan computer & perlengkapannya	Komputer PC & LCD	100 %	550.000,-	4.450.000,-	35.000.000,-	-	-	-	-	-	-
	5. Pemel rutin/ berkala gedung kantor	Pemel rutin/ berkala gedung kantor	100 %	15.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	6. Pemel rutin/ berkala	Pemel rutin/ berkala	100 %	-	20.000.000,-	-	-	25.440.000,-	-	-	-	-

3.3	mobil jabatan 7. Pemel rutin/ berkala mebeler	mobil jabatan Pemel rutin/ berkala mebeler	100 %	-	2.000.000,-	-	-	2.000.000,-	-	-	-
-----	---	--	-------	---	-------------	---	---	-------------	---	---	---

- 2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH											
4.	Program :	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan									
4.1	Kegiatan :	5. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingk	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingk	100 %	5.495.000	34.505.000	-	5.495.000	34.505.000	-	-
		6. Pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingk	Pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingk	100 %	8.495.000	31.505.000	-	8.495.000	31.505.000	-	-
		7. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingk	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingk	100 %	101.210.000	164.590.000	-	126.410.000	169.390.000	-	-
		8. Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingk	Pembinaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingk	100 %	15.800.000	31.450.000	-	19.750.000,-	31.450.000	-	-
5.	Program :	Pemeliharaan Kamtramtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal									
5.1	Kegiatan :	Peningkatan aparat dlm siskamswakarsa di daerah	Pembinaan Linmas Inti	100 %	10.600.000	30.558.000		12.950.000,-	34.143.000		
6	Program :	Pengembangan Wawasan Kebangsaan									
6.1	Kegiatan :	3. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kal masy	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kal masy	100 %	2.580.000	27.420.000	-	2.580.000	27.420.000	-	-
		4. Peningkatan kesadaran masy akan nilai-2 luhur bdy bgs	Peningkatan kesadaran masy akan nilai-2 luhur bdy bgs	100 %	7.70.000	22.300.000	-	7.70.000	22.300.000	-	-
7	Program :	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan									
7.1	Kegiatan :	3. Penyusunan data base, Yayasan & LSM	Jml generasi yg di suluh	100 %	13.250.000	31.750.000	-	13.250.000	31.750.000	-	-

	4. Penyuluhan trantibum & penegakan perda	Jml ormas/ LSM/ pelajar yang di suluh	100 %	18.925.000	31.075.000	-	24.200.000	36.475.000	-	-	-
--	---	---------------------------------------	-------	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program : Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)										
8.1	Kegiatan : 3. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan miras & narkoba		100 %	6.695.000	33.305.000	-	6.695.000	33.305.000	-	-	-
	4. Fasilitasi pencegahan penyalhgunaan narkoba	Jml peserta rakor	100 %	2.750.000	37.250.000	-	2.750.000	37.250.000	-	-	-
9	Program : Pendidikan politik masyarakat										
9.1	Kegiatan : 3. Penyuluhan kepada masyarakat	Jml partai politik	100 %	5.650.000	34.350.000	-	14.130.000,-	50.870.000,-	-	-	-
	4. Koord. Forum2 diskusi politik	Jml masyarakat yang di suluh	100 %	13.800.000	27.200.000	-	14.400.000	44.750.000	-	-	-
10	Program : Pencegahan dini dlm Penagg. Korban Bencal										
10.1	Kegiatan : Pemantauan & penyebarluasan informasi potensi bencal	Terpantaunya bencal di Kab. Pematang	100 %	-	52.492.000			52.492.000			
JUMLAH											

KEPALA KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SATUAN KERJA  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA. 2011

NAMA SKPD : KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG.

No	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR					PERMASLAHAN
		MASUKAN	KELUARAN	HASIL	MANFAAT	DAMPAK	
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan & Kenyamanan Lingk.	Rp. 40.000.000	Jml tenaga pengendali keamanan lingk. (525 orang)	Prosentase terciptanya keamanan & ketertiban daerah 100 %	Terciptanya keamanan & ketertiban daerah	Terciptanya keamanan & ketertiban daerah	-
2.	Pelatihan Pengend Kemanan & Kenyamanan Lingkungan	Rp. 40.000.000	Jml Peserta Pelatihan (60orang)	Terpeliharanya tingkat persatuan & kesatuan	Peningkatan Kemampuan dlm Pelaksanaan Tugas	Peningkatan Kemampuan dlm Pelaksanaan Tugas	-
3.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Rp. 295.800.000	Jml pembinaan tenaga pengendali keamanan & kenyamanan lingk.	Prosentase terwujudnya keamanan & kenyamanan lingk.	Meningkatnya Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	-
4.	Pembinaan Tenaga Pengendali	Rp. 51.200.000	Pembinaan/ Diklat Hansip/ Linmas di Provinsi & Kab.	Meningkatnya tugas pokok & fungsi Hansip pada Masyarakat	Kelancaran & Pelaksanaan Tugas	Kelancaran & Pelaksanaan Tugas	-
5.	Peningkatan Kapasitas Aparat dlm rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Rp. 47.093.000	Pembentukan Pelakasanaan Siskamswakarsa (Linmas Inti di Daerah )	Terbentuknya Linmas Inti di Daerah yg di butuhkan	Terpeliharanya Kamtramtibmas	Terpeliharanya Kamtramtibmas	-
6.	Peningkatan Rasa Solidaritas & Ikatan Sosial di Masyarakat	Rp. 30.000.000	Jml peserta forum persaudaraan Bangsa Ind. (100 orang)	Terpeliharanya Persaudaraan Bgs Ind. Di Kabupaten Pemalang	Berkembangnya Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya Wawasan Kebangsaan	-
7.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai2 luhur budaya bangsa	Rp. 30.000.000	Penyelenggaraan Forum Wasbang & Orketbang	Peningkatan Pemahaman Wasbang & Orketbang	Peningkatan Pengetahuan tentang Wasbang & Orketbang	Terpeliharanya Persatuan & Kesatuan Bangsa	-

1	2	5	6	7	8	9	10
8.	Penyusunan data base Ormas yayasan & LSM.	Rp.45.000.000	Jml data base Ormas yayasan & LSM yg tersusun	Prosentase tersusunnya data base Ormas, Yayasan & LSM.	Tertib Administrasi	Terautentifikasinya data base & pembinaan LSM	-
9.	Penyuluhan Trantibum & Penegakan Perda	Rp. 60.675.000	Jml Penyuluhan, Rakor & Monitoring Kerukunan Umat Beragama	Prosentase terciptanya Kerukunan & mencegah konflik antar umat beragama	Meningkatnya pemebrdayaan Masyarakat utk menjaga ketertiban & keamanan	Meningkatnya pemebrdayaan Masyarakat utk menjaga ketertiban & keamanan	-
10.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras & Narkoba	Rp. 40.000.000	Jml Generasi Muda yg di suluh	Prosentase terselenggaranya penyuluhan pencegahan miras & narkoba	Terbebasnya Kabupaten Pemalang dari miras & narkoba	Terbebasnya Kabupaten Pemalang dari miras & narkoba	-
11.	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Rp. 40.000.000	Jml peserta yang di suluh	Prosentase terselenggaranya penyuluhan narkoba	Terbebasnya Kabupaten Pemalang dari narkoba	Terbebasnya Kabupaten Pemalang dari narkoba	-
12.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Rp. 65.000.000	Jml masyarakat yang di suluh	Prosentase terselenggaranya penyuluhan	Pengetahuan masyarakat meningkat	Terpeliharanya kamtrantibmas	-
13.	Koord. Forum2 Diskusi Politik	Rp. 59.150.000	Jml peserta rakor	Tercapainya kesepakatan politik antar parpol	Menambah pengetahuan anggota parpol	Mengurangi ketegangan politik antar parpol	-
14.	Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Potensi Bencal	Rp. 52.492.000	Jml Pemantauan & Penyebarluasan Informasi Potensi Bencal	Prosentase terciptanya pencegahan dini penanggl. Korban Bencal	Meningkatnya pencegahan dini & penanggl. Korban bencal	Memberiakan informasi kpd masyarakat tentang Satlak PB	-
Jumlah		Rp. 896.410.000					

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.



## Matrik Program Tahunan SKPD

NAMA SKPD : KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG.  
 RENSTRA SKPD PERIODE : 2011 – 2016  
 URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

No	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN		PAGU INDIKATIF														
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2010)	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015		
				Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Rp. (jutaan)	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	21. BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	152.151		APBD Kab. Peming	Kab. Peming	159.880	APBD Kab. Peming	Kab. Peming	160.000	APBD Kab. Peming	Kab. Peming	161.000	APBD Kab. Peming	Kab. Peming	162.000	APBD Kab. Peming	Kab. Peming
	b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	457.610		APBD Kab. Peming	Kab. Peming	165.680	APBD Kab. Peming	Kab. Peming	166.000	APBD Kab. Peming	Kab. Peming	167.000	APBD Kab. Peming	Kab. Peming	168.000	APBD Kab. Peming	Kab. Peming

	c. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		1.460.650		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	395.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang
	d. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		60.000		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	60.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang
	e. Pengembangan Wawasan Kebangsaan		40.000		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang	435.000	APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang		APBD Kab. Pematang	Kab. Pematang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	f. Pembedayaan Masyarakat utk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		132.250		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	215.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	g. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Peklat)		40.000		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	100.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	h. Pendidikan Politik Masyarakat		555.250		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	235.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang

	i. Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam		67.038		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang	50.000	APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang		APBD Kab. Pemalang	Kab. Pemalang
	C. LINTAS SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D. KEWILAYAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG

AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.  
Pembina  
NIP. 19600718 198607 1 001.

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011  
KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS KABUPATEN PEMALANG

NO	PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCAM		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yg dikelola	100%	Jumlah surat yang terkirim & surat masuk	100%	7,335,000.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik terhadap kebutuhan yg direncanakan	100%	25,995,000.00
		Pelayanan peralatan & perlengkapan kantor	Jml peralatan & perlengkapan kantor yg diadakan	100%	Tugas kedinasan menjadi lancar	100%	10,000,000.00
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	100%	Kebersihan kantor dapat terjaga	100%	2,000,000.00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg dibeli/tersedia	100%	Jumlah alat tulis kantor terhadap kebutuhan	100%	7,000,000.00
		Pelayanan Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	Jml tersedianya barang cetakan & penggandaan	100%	Jumlah barang cetak & penggandaan yg tercukupi terhadap kebutuhan	100%	13,420,000.00
		Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	100%	Keamanan & kenyamanan dlm pelaksanaan tugas kedinasan	100%	3,000,000.00
		Penyediaan makanan & minuman kantor	Tersedianya makanan minuman tamu & pegawai	100%	Tersedianya makanan minuman terhadap kebutuhan	100%	26,900,000.00
		Rapat-2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jml penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	rencana tindak lanjut kegiatan	100%	40,850,000.00
		Pelayanan keamanan sehari-hari	Terbayarnya petugas piket	100%	Penyelesaian tugas kedinasan dan penyelesaian masalah-masalah bencana alam	100%	13,650,000.00

-2-

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pengadaan komputer & perlengkapannya	Tersedianya komputer note book	100%	Tersedianya komputer yang memadai	100%	40,000,000.00
		Pemeliharaan gedung kantor	Jml gedung kantor yang terpelihara	100%	Gedung kantor tempat bekerja menjadi lebih baik & nyaman	100%	15,000,000.00

		Pemeliharaan mobil dinas kantor	Jml kendaraan yang terpelihara	100%	Kendaraan dinas dalam keadaan baik & terpelihara	100%	25,440,000.00
		Pemeliharaan mebelair kantor	Jml mebelair yang terpelihara	100%	Mebelair dalam keadaan baik terhadap kebutuhan yg direncanakan	100%	2,000,000.00
3	Peningkatan keamanan & kenyamanan lingk.	Peningkatan tugas pokok & fungsi Hansip/ Linmas tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jml tenaga pengendali keamanan yg disiapkan	100%	Peningkatan keamanan masyarakat lebih terjamin	100%	40,000,000.00
		Palatihan bagi Linmas / Latihan & Ketrampilan Perlindungan Masyarakat	Jml org yg ikut Pelatihan pengendalian keamanan & kenyamanan lingk.	100%	Peningkatan sumber daya manusia	100%	40,000,000.00
		Membantu menjaga keamanan & ketertiban daerah	Jml org yg ikut penyiapan petugas Posko & PAMRI, KOMINDA, FKDM, PAM Patroli, 1 & PAM Lebaran-Tahun Baru.	100%	Keamanan & ketertiban daerah dapat terjaga	100%	295,800,00.00
		Pembinaan, Diklat, Perawatan, Tali Asih & Santunan Anggota HANSIP	Jumlah HANSIP/ LINMAS yang mendapatkan tali asih dan santunan	100%	Meningkatkan kesejahteraan HANSIP/ LINMAS	100%	51,200,000.00
4	Pemel. Kanrantibmas & pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dlm rangka pelaks siskamswakarsa di daerah	Jumlah HANSIP/ LINMAS inti yang terlatih di Kabupaten Pematang	100%	Sumber daya manusia aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah dapat meningkat	100%	47,093,000.00
5	Pengembangan wawasan kebangsaan	Terpeliharanya persatuan & kesatuan bangsa	Jumlah peserta Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	100%	Terpeliharanya Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	100%	30,000,000.00
		Terpeliharanya persatuan & kesatuan bangsa	Jml orang yang ikut penyelenggaraan Forum Wawasan Kebangsaan dan Orientasi Ketahanan Bangsa	100%	Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Orientasi Ketahanan Bangsa	100%	30,000,000.00

-3-

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pemberdayaan masy. untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terautentifikasinya data base & pembinaan Ormas, Yayasan & LSM	Diketuainya jumlah data base ormas, yayasan & LSM	100%	Teridentifikasinya data autentifikasi Ormas, Yayasan & LSM.	100%	45,000,000.00

7	Peningkatan pemberantasan penyakit masy. (pekat)	Penyuluhan, Rakor dan monitoring kerukunan umat beragama	Terciptanya kerukunan umat bergama/sosialisasi FKUB	100%	Konflik antar inter umat beragama dapat ditekan	100%	60,675,000.00
		Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar & mahasiswa	Jml pelajar & mahasiswa yang disuluh	100%	Meningkatkan pengetahuan pelajar dan mahasiswa tentang bahaya minuman keras dan narkoba	100%	40,000,000.00
		Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jml peserta yang di suluh	100%	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg bahaya narkoba	100%	40.000.000.00
8	Pend. Politik masy.	Penyuluhan kepada masyarakat	Jml masyarakat yang di suluh	100%	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg politik	100%	65,000,000.00
		Forum2 diskusi politik	Jml peserta rakor	100%	Meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg politik	100%	59.150.000.00
9	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pelayanan informasi bencana alam	Jml frekuensi Pemantauan dan Penyeberluasan Informasi Bencana Alam	100%	Kegiatan pemantauan bencana alam dapat direncanakan dengan baik	100%	52,492,000.00
<b>Jumlah</b>							<b>1,129,000,000.00</b>

Menyetujui :  
BUPATI PEMALANG

**H. JUNAEDI, SH, MM**

Pemalang, Januari 2011  
KEPALA KANTOR KESBANG, POL DAN LINMAS

**AKHMAD PATAH, S.IP, M. Si.**